Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education
Vol. 7 No. 10 (2026), hlm. 241-257, DOI: 10.32832/itjmie.v7i10.24466
ISSN: 2654-5845 (Online)

Kesenjangan implementasi kurikulum merdeka antara madrasah unggul dan reguler: Analisis kebijakan pendidikan

Anisa Hasna, Uswatun Khasanah*, Sita Ratnaningsih
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
*uushasanah560@gmail.com

Abstract

Facts indicate a systemic inequality in the quality of education within madrasah, despite their constitutional status as an integral part of the National Education System. The implementation of the Independent Curriculum, which demands teacher flexibility and independence, often faces challenges in the realities of the field, resulting in a gap in service quality between superior and regular madrasas. This study aims to analyze the gap in the implementation of the Independent Curriculum between superior and regular madrasas, identify the influencing factors, and examine the position of education policy in mitigating this disparity. The research methodology used in this study is a qualitative research method with a literature study approach (library research) and descriptive policy analysis. The results of the literature analysis indicate that: First, superior madrasas demonstrate greater readiness in terms of curriculum management, teacher capacity, and the use of digital facilities and infrastructure to support project-based learning (P5RA). Second, there are factors that hinder implementation in regular madrasas, namely limited access to training for teachers, the density of the madrasah-specific subject structure, and minimal infrastructure support compared to superior madrasas. Third, the government and relevant authorities play a role in determining policy direction to address this gap by synchronizing regulations, strengthening budgets for private and regular madrasas, and equitably distributing teacher pedagogical competency development programs to ensure that graduate competency standards can be achieved equitably for all students.

Keywords: *policy analysis; curriculum implementation; educational disparity; exemplary madrasah; regular madrasah.*

Abstrak

Fakta menunjukkan adanya fenomena ketimpangan sistemik dalam kualitas pendidikan di lingkungan madrasah, meskipun secara konstitusional lembaga ini merupakan bagian integral dari Sistem Pendidikan Nasional. Implementasi Kurikulum Merdeka, yang menuntut fleksibilitas dan kemandirian guru, sering kali menghadapi kendala realitas lapangan yang berbeda antara satuan pendidikan, sehingga memicu kesenjangan kualitas layanan antara madrasah kategori unggul dan reguler. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan implementasi Kurikulum Merdeka antara madrasah unggul dan reguler, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta menelaah posisi kebijakan pendidikan dalam memitigasi disparitas tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*) dan analisis kebijakan deskriptif. Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa: Pertama, madrasah unggul menunjukkan kesiapan yang lebih matang dalam aspek manajemen kurikulum, kapasitas tenaga pendidik, serta pemanfaatan sarana dan prasarana digital untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek Projek Penguatan Profil Pelajaran Pancasila dan *Rahmatan lil alamin* (P5RA). Kedua, terdapat

Copyright (c) author/s (2026)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-SA)
Article Information: Submitted 07 July 2026, Accepted 10 October 2026, Published 31 October 2026

faktor-faktor yang menghambat implementasi di madrasah reguler, yaitu keterbatasan akses pelatihan bagi guru, kepadatan struktur mata pelajaran khas madrasah, serta minimnya dukungan fasilitas infrastruktur dibandingkan madrasah kategori unggul. Ketiga, pemerintah dan otoritas terkait berperan dalam menentukan arah kebijakan untuk mengatasi kesenjangan tersebut melalui sinkronisasi regulasi, penguatan anggaran madrasah swasta/reguler, serta pemerataan program pengembangan kompetensi pedagogik guru agar standar kompetensi lulusan dapat tercapai secara adil bagi seluruh peserta didik.

Kata kunci: analisis kebijakan; implementasi kurikulum; kesenjangan pendidikan; madrasah unggul; madrasah reguler.

Pendahuluan

Pendidikan adalah elemen penting dalam kehidupan masyarakat dan negara sebab berfungsi dalam mengembangkan sikap beragama, etika, serta keterampilan sosial para siswa. Selain itu, pendidikan juga bertujuan untuk meningkatkan potensi anak didik secara komprehensif. Kurikulum Merdeka adalah inisiatif pendidikan yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2022, bertujuan memberikan kebebasan bagi institusi pendidikan dalam menyusun proses belajar yang sejalan dengan kebutuhan, minat, dan potensi siswa. Kurikulum ini lebih fokus pada pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan, variasi, serta penguatan karakter melalui Projek Penguatan Profil Pelajaran Pancasila dan *Rahmatan lil alamin* (P5RA). Pendekatan ini mengharuskan adanya perubahan cara pandang dalam pembelajaran yang lebih relevan, dinamis, dan berfokus pada siswa. Dalam konteks madrasah, penerapan Kurikulum Merdeka menghadapi tantangan tersendiri karena terdapat ciri khas dari lembaga pendidikan Islam yang memadukan kurikulum nasional dengan komponen keagamaan serta nilai-nilai Islam. Dalam ranah pendidikan, kurikulum memiliki fungsi yang krusial karena menetapkan arah, isi, dan cara pembelajaran yang akan berdampak pada mutu lulusan dari suatu lembaga pendidikan (Oktapiani, 2019). Kurikulum yang sesuai dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi utama dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional yang berbudi pekerti dan berkualitas. Menurut Sukiyat (2020), Pancasila sebagai prinsip filosofis negara Indonesia memiliki peranan penting dalam sistem pendidikan, terutama dalam pengembangan karakter pendidikan. Kurikulum sebagai panduan pendidikan perlu mencakup materi, sasaran, serta metode pengajaran yang dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dengan cara ini, kurikulum bukan hanya berfungsi sebagai pedoman praktis dalam pembelajaran, tetapi juga sebagai alat strategis untuk menghasilkan lulusan yang memiliki karakter yang kokoh, beretika, dan sejalan dengan identitas bangsa (Rohmawan, 2023). Oleh karena itu, sangat krusial bagi kurikulum untuk selalu diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik.

Secara konstitusional, madrasah telah diakui sebagai bagian integral dari Sistem Pendidikan Nasional melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun (2003), yang menjamin kesetaraan hak pendidikan bagi seluruh warga negara. Dalam menjawab tantangan abad ke-21, pemerintah meluncurkan kebijakan Kurikulum Merdeka untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan dalam merancang pembelajaran yang adaptif. Di lingkungan madrasah, transformasi ini dipertegas melalui pergeseran regulasi dari KMA Nomor 347 Tahun 2022 menuju KMA Nomor 450 Tahun 2024, yang menekankan pada

nilai *rahmatan lil alamin* dan penguatan karakter melalui Projek Penguatan Profil Pelajaran Pancasila dan *Rahmatan lil alamin* (P5RA). Namun, kebijakan ini juga mengandung makna simbolik yang mencerminkan upaya penciptaan identitas kultural madrasah yang integratif antara nilai nasional dan Islam. Dalam realitasnya, terdapat fenomena ketimpangan sistemik yang mengakar sejak masa kolonial, menciptakan dualisme antara sekolah umum dan pendidikan Islam. Permasalahan umum muncul dalam bentuk diskriminasi alokasi anggaran, kualitas tenaga pengajar, serta akses terhadap sarana prasarana digital.

Implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah sesungguhnya tidak sekadar soal revisi dokumen kurikulum, tetapi merupakan transformasi dalam sistem pendidikan yang memerlukan kesiapan organisasi. Para pengajar harus memiliki kemampuan untuk merancang proses pembelajaran yang lebih adaptif, inovatif, dan relevan. Namun, kesiapan ini sangat bergantung pada kemampuan masing-masing madrasah dalam menyediakan sumber daya yang diperlukan, termasuk kompetensi guru, kepemimpinan kepala madrasah, sarana pembelajaran, dan juga budaya organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Priatmoko (2024) mengungkapkan bahwa kesiapan guru adalah faktor krusial untuk keberhasilan kolaborasi Implementasi Kurikulum Merdeka, karena guru adalah individu kunci yang menerapkan kebijakan kurikulum dalam praktik mengajar sehari-hari.

Secara teoritis, analisis terhadap penerapan kebijakan pendidikan dapat dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan yang diajukan oleh George C. Edward III. Menurut Edward III, keberhasilan kebijakan tergantung pada empat faktor pokok yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposition pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi berhubungan dengan sejauh mana kebijakan dijelaskan dengan jelas kepada pelaksananya, sumber daya berhubungan dengan ketersediaan tenaga kerja, fasilitas, serta anggaran yang diperlukan, disposisi berhubungan dengan sikap dan komitmen dari para pelaksana kebijakan, sedangkan struktur birokrasi berhubungan dengan cara organisasi melaksanakan kebijakan tersebut Fadly & Syafri (2019). Berdasarkan teori ini, pelaksanaan Kurikulum Merdeka di madrasah tidak hanya dapat dilihat sebagai sebuah proses administratif, tetapi juga sebagai suatu kebijakan yang sangat dipengaruhi oleh kapasitas internal dari institusi pendidikan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan Kurikulum Merdeka menunjukkan adanya variasi dalam kemampuan menyesuaikan diri antara satu madrasah dan madrasah lainnya. Madrasah yang termasuk dalam kategori unggul biasanya memiliki tingkat kesiapan yang lebih baik karena didukung oleh guru-guru yang lebih berkapasitas, sistem manajerial yang lebih efisien, sarana belajar yang memadai, serta kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital. Sebaliknya, madrasah reguler masih menghadapi beberapa permasalahan seperti kurangnya akses terhadap pelatihan bagi guru, minimnya pendampingan dalam penerapan, keterbatasan fasilitas, dan tantangan dalam melakukan inovasi dalam pembelajaran. Penelitian yang dilakukan oleh Apriatni (2023), tentang kesiapan madrasah dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa penerapan kurikulum tersebut masih menghadapi berbagai tantangan terkait dengan kesiapan sumber daya dan situasi masing-masing lembaga pendidikan.

Perbedaan dalam kemampuan ini mencerminkan adanya fenomena kesenjangan implementasi, yang merujuk pada selisih antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan kenyataan di lapangan. Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi madrasah untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, namun fleksibilitas ini tidak selalu menjamin kualitas pelaksanaan yang seragam, mengingat setiap madrasah memiliki kondisi sumber daya yang berbeda. Sebagai hasilnya, terjadilah ketimpangan dalam layanan pendidikan antara madrasah yang memiliki kapasitas kelembagaan yang baik dan yang masih terhambat oleh keterbatasan.

Beberapa studi sebelumnya telah mengeksplorasi penerapan Kurikulum Merdeka di berbagai unit pendidikan. Penelitian oleh Priatmoko (2024), menyoroti kesiapan para guru madrasah ibtidaiyah dalam menerapkan Kurikulum Merdeka, dan menemukan bahwa kompetensi serta kesiapan guru adalah faktor vital bagi keberhasilan dari proses implementasi. Penelitian yang dilakukan oleh Apriatni (2023), menganalisis kesiapan madrasah dalam menerapkan Kurikulum Merdeka dan menunjukkan bahwa faktor internal lembaga memengaruhi penerapan kurikulum tersebut. Selain itu, menyelidiki kesiapan guru madrasah mengungkapkan bahwa pemahaman serta kemampuan pedagogik guru merupakan aspek krusial dalam menyongsong perubahan kurikulum. Penelitian dari Mutamimah (2025) juga menunjukkan bahwa meskipun guru telah melakukan persiapan untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, masih ada tantangan berupa kurangnya fasilitas dan pengalaman dalam menerapkan metode pembelajaran.

Berdasarkan *gap analysis* di atas, kontribusi kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini adalah: (1) menyajikan analisis konseptual tentang perbedaan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka antara madrasah unggul dan madrasah reguler melalui sudut pandang ketidakselarasan kapasitas kelembagaan. Tidak hanya fokus pada kesiapan tenaga pengajar, tetapi juga melibatkan aspek manajemen, dukungan sumber daya, infrastruktur, serta budaya organisasi di madrasah dan (2) menawarkan sudut pandang kebijakan pendidikan yang lebih menyeluruh untuk memahami penerapan Kurikulum Merdeka sebagai suatu proses transformasi kelembagaan, bukan sekedar alih tugas administratif kurikulum. Dengan cara ini, strategi untuk menyamakan kualitas pendidikan madrasah dapat diarahkan melalui penguatan kemampuan pengajar, pengembangan kepemimpinan di madrasah, distribusi fasilitas pembelajaran yang lebih merata, serta merancang kebijakan pendampingan yang efektif untuk menjembatani celah yang ada antara madrasah unggul dan madrasah reguler.

Melalui kajian ini diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang implementasi Kurikulum Merdeka di lingkungan madrasah, sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi pendidik, optimalisasi kepemimpinan kepala madrasah, serta pemerataan dukungan sumber daya pendidikan. Secara ilmiah, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian implementasi kebijakan pendidikan Islam dengan memperkaya analisis mengenai hubungan antara kebijakan Kurikulum Merdeka dan kapasitas kelembagaan madrasah. Selain itu, hasil kajian ini diharapkan menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya sekaligus memberikan rekomendasi berbasis bukti bagi pemerintah,

Kementerian Agama, dan pengelola madrasah dalam merumuskan kebijakan pendampingan serta penguatan implementasi Kurikulum Merdeka secara lebih efektif, adaptif, dan berkeadilan.

Metode Penelitian

Bagian Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan strategi riset pustaka dan analisis terhadap kebijakan pendidikan. Metode kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam mengenai fenomena kesenjangan penerapan Kurikulum Merdeka antara madrasah unggul dan madrasah reguler, melalui tinjauan terhadap berbagai sumber literatur, dokumen kebijakan, serta studi sebelumnya yang relevan. Pendekatan ini memberikan peneliti kesempatan untuk menginterpretasikan proses pelaksanaan kebijakan pendidikan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan dalam penerapan Kurikulum Merdeka di berbagai tipe madrasah.

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama diawali dengan identifikasi isu penelitian, yaitu mengenali fenomena penerapan Kurikulum Merdeka di lingkungan madrasah, khususnya terkait perbedaan kesiapan dan kemampuan implementasi antara madrasah unggulan dan madrasah reguler. Identifikasi isu dilakukan melalui penelaahan berbagai tinjauan akademis, regulasi pemerintah, serta fenomena pendidikan yang relevan dengan implementasi Kurikulum Merdeka. Setelah isu penelitian ditetapkan, tahap berikutnya adalah pengumpulan data pustaka dengan menelusuri berbagai sumber literatur yang berkaitan, meliputi artikel jurnal nasional dan internasional, buku akademik, regulasi pemerintah, serta dokumen kebijakan mengenai Kurikulum Merdeka di madrasah. Sumber utama yang dijadikan rujukan berasal dari regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama Republik Indonesia, termasuk Keputusan Menteri Agama (KMA) yang mengatur pedoman pelaksanaan Kurikulum Merdeka di madrasah.

Selanjutnya, seluruh literatur yang telah terkumpul diseleksi berdasarkan tingkat relevansinya dengan tujuan penelitian. Literatur yang memenuhi kriteria kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa tema analisis, yaitu konsep dan kebijakan Kurikulum Merdeka, penerapan Kurikulum Merdeka di madrasah, kesiapan tenaga pendidik, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan, serta perbedaan kualitas layanan pendidikan antara madrasah unggulan dan madrasah reguler. Tahap berikutnya adalah pengolahan data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk menginterpretasikan berbagai temuan yang diperoleh dari sumber-sumber literatur. Analisis tersebut menjadi kerangka dalam mengidentifikasi penyebab terjadinya perbedaan implementasi Kurikulum Merdeka antara madrasah unggulan dan madrasah reguler. Pada tahap akhir, dilakukan penafsiran hasil analisis serta penyusunan kesimpulan dengan mengidentifikasi pola-pola perbedaan penerapan Kurikulum Merdeka beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil kajian kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan mengenai peran kebijakan pendidikan dalam mengatasi kesenjangan implementasi Kurikulum Merdeka, sekaligus menyusun

rekomendasi strategis untuk mendukung pemerataan kualitas pendidikan di lingkungan madrasah.

Hasil dan Pembahasan

A. Temuan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis berbagai dokumen kebijakan, regulasi pemerintah, buku ilmiah, dan artikel jurnal nasional maupun internasional yang membahas implementasi Kurikulum Merdeka di lingkungan madrasah. Analisis dilakukan melalui proses identifikasi literatur, reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi, dan sintesis sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kesenjangan implementasi Kurikulum Merdeka antara madrasah unggul dan madrasah reguler. Pendekatan tersebut dipilih karena memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola implementasi kebijakan dari berbagai konteks madrasah serta membandingkan hasil penelitian terdahulu secara sistematis (Creswell, 2013).

Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah belum berlangsung secara merata. Meskipun pemerintah telah memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasional sesuai karakteristik peserta didik, kemampuan setiap madrasah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut masih menunjukkan variasi yang cukup besar. Variasi tersebut dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia, dukungan kepemimpinan, sarana pembelajaran, serta kebijakan pendampingan yang diterima masing-masing madrasah. Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kapasitas organisasi dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik pembelajaran (Fadhilah & Umami, 2023).

Berdasarkan hasil sintesis terhadap berbagai penelitian, ditemukan enam tema utama yang memengaruhi implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah, yaitu (1) manajemen kurikulum, (2) kompetensi guru, (3) kepemimpinan kepala madrasah, (4) sarana dan prasarana pembelajaran, (5) implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Rahmatan lil 'Alamin (P5RA), dan (6) dukungan kebijakan pemerintah. Keenam tema tersebut menunjukkan tingkat kesiapan yang berbeda antara madrasah unggul dan madrasah reguler sehingga menghasilkan kualitas implementasi yang tidak seragam. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka merupakan hasil interaksi berbagai komponen sistem pendidikan, bukan hanya ditentukan oleh kemampuan guru dalam mengajar.

Hasil kajian terhadap penelitian Hardianti dkk. (2021) menunjukkan bahwa madrasah yang memiliki sistem manajemen kurikulum yang baik cenderung lebih berhasil mengimplementasikan perubahan kurikulum. Keberhasilan tersebut ditunjukkan melalui perencanaan kurikulum yang sistematis, pembagian tugas yang jelas, pelaksanaan pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik, serta evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Sebaliknya, madrasah yang belum memiliki manajemen kurikulum yang efektif mengalami kesulitan dalam menerjemahkan kebijakan menjadi

praktik pembelajaran yang sesuai dengan prinsip Kurikulum Merdeka (Hardianti dkk., 2021).

Selain aspek manajemen, kompetensi guru menjadi faktor dominan dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Hasil sintesis menunjukkan bahwa guru pada madrasah unggul umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi, asesmen diagnostik, penyusunan modul ajar, serta pembelajaran berbasis proyek. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya partisipasi guru dalam berbagai pelatihan, *workshop*, dan komunitas belajar. Sebaliknya, guru di madrasah reguler masih mengalami keterbatasan akses terhadap program pengembangan profesional sehingga pemahaman mengenai implementasi Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya merata. Temuan ini mendukung hasil penelitian Priatmoko (2024) yang menyatakan bahwa kesiapan guru merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka.

Penelitian Hidayati dkk. (2025) memperlihatkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di MIN 1 Yogyakarta masih menghadapi kendala berupa tingginya jumlah mata pelajaran khas madrasah, keterbatasan pelatihan guru, serta belum optimalnya keterlibatan orang tua dalam pembelajaran berbasis proyek. Walaupun demikian, guru berupaya mengatasi berbagai kendala tersebut melalui penyusunan modul ajar secara mandiri, penggunaan media pembelajaran digital, serta penerapan asesmen formatif sebagai bagian dari strategi adaptasi terhadap Kurikulum Merdeka.

Temuan lain menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala madrasah memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Kepala madrasah pada lembaga yang tergolong unggul umumnya berperan sebagai pemimpin pembelajaran (*instructional leader*) yang mampu mengembangkan budaya organisasi pembelajar, membangun kolaborasi antar guru, serta memfasilitasi peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan. Sebaliknya, sebagian kepala madrasah di madrasah reguler masih lebih berorientasi pada pengelolaan administratif sehingga proses transformasi pembelajaran berlangsung lebih lambat (Rosa & Dania, 2021).

Dari aspek kebijakan, hasil analisis menunjukkan adanya perubahan paradigma implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah melalui diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 sebagai penyempurnaan terhadap KMA Nomor 347 Tahun 2022. Regulasi terbaru tersebut menegaskan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah tidak hanya berorientasi pada pencapaian kompetensi akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter melalui integrasi nilai Rahmatan lil 'Alamin, Projek Penguatan Profil Pelajaran Pancasila dan *Rahmatan lil alamin* (P5RA), pembelajaran berbasis proyek, serta asesmen autentik. Menurut Jauhari dkk., (2025), perubahan tersebut menunjukkan adanya transformasi kebijakan dari pendekatan administratif menuju pendekatan transformatif yang lebih berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik.

Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Projek Penguatan Profil Pelajaran Pancasila dan *Rahmatan lil alamin* (P5RA) memberikan dampak positif terhadap penguatan karakter peserta didik melalui kegiatan proyek yang menumbuhkan nilai gotong royong, toleransi, kepedulian sosial, serta tanggung jawab. Namun demikian, penelitian tersebut juga menemukan bahwa keberhasilan implementasi Projek

Penguatan Profil Pelajaran Pancasila dan *Rahmatan lil alamin* (P5RA) sangat dipengaruhi oleh kesiapan guru, dukungan kepala madrasah, keterlibatan orang tua, serta ketersediaan waktu pembelajaran (Hidayat & Suyatno, 2022).

Secara keseluruhan, hasil sintesis berbagai penelitian memperlihatkan bahwa kesenjangan implementasi Kurikulum Merdeka antara madrasah unggul dan madrasah reguler merupakan konsekuensi dari perbedaan kapasitas kelembagaan dalam mengelola perubahan kebijakan. Madrasah yang memiliki kepemimpinan yang kuat, guru yang kompeten, budaya organisasi yang kolaboratif, serta dukungan sarana pembelajaran yang memadai mampu mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara lebih efektif dibandingkan madrasah yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, implementasi Kurikulum Merdeka perlu dipahami sebagai proses transformasi kelembagaan yang memerlukan dukungan kebijakan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Tabel 1. Hasil Sintesis Temuan Penelitian

Aspek	Madrasah Unggul	Madrasah Reguler	Referensi
Manajemen kurikulum	Terencana, sistematis, evaluasi berkelanjutan	Masih berorientasi administrasi	(Hardianti dkk., 2021)
Kompetensi guru	Pelatihan merata, mampu menerapkan diferensiasi	Pelatihan terbatas	(Priatmoko dkk., 2024) (Wiji Hidayati, 2025)
Kepemimpinan	*Instructional leadership*	Administratif	(Rosa, Dania, 2021)
Sarana pembelajaran	Digital dan lengkap	Terbatas	(Wahyudi dkk., 2024)
Implementasi P5RA	Terstruktur	Belum optimal	(Hidayat & Suyatno, 2022)
Kebijakan	Adaptif terhadap KMA 450, Tahun 2024	Adaptasi masih lambat	(Jauhari dkk., 2025)

Berdasarkan Tabel 1, hasil sintesis menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara madrasah unggul dan madrasah reguler dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Perbedaan tersebut tampak pada aspek manajemen kurikulum, kompetensi guru, kepemimpinan kepala madrasah, ketersediaan sarana pembelajaran, implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan *Rahmatan lil alamin* (P5RA), serta kemampuan adaptasi terhadap kebijakan terbaru. Madrasah unggul umumnya telah menerapkan manajemen kurikulum yang lebih sistematis, didukung oleh evaluasi berkelanjutan, kepemimpinan yang berorientasi pada *instructional leadership,* kompetensi guru yang memadai, serta pemanfaatan sarana pembelajaran berbasis digital. Sebaliknya, madrasah reguler masih menghadapi berbagai keterbatasan, antara lain orientasi manajemen yang lebih bersifat administratif, kesempatan pelatihan guru yang belum merata, keterbatasan sarana dan prasarana, serta implementasi P5RA yang belum berjalan secara optimal.

Temuan sintesis tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan masing-masing madrasah. Kesenjangan tersebut mengindikasikan bahwa perbedaan kualitas sumber daya manusia, kepemimpinan, dukungan fasilitas, dan kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap perubahan kebijakan menjadi faktor utama yang membedakan tingkat keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Dengan demikian, hasil sintesis ini memperkuat argumentasi bahwa implementasi kebijakan pendidikan perlu dianalisis secara komprehensif melalui

perspektif implementasi kebijakan George C. Edward III, khususnya pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sebagai faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan di tingkat madrasah.

B. Pembahasan

1. Kesenjangan implementasi kurikulum merdeka antara madrasah unggul dan madrasah reguler

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah belum berjalan secara merata meskipun pemerintah telah menyediakan regulasi yang menjadi pedoman pelaksanaannya. Perbedaan implementasi terlihat dari kesiapan sumber daya manusia, efektivitas kepemimpinan kepala madrasah, kualitas manajemen kurikulum, hingga ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola perubahan secara sistematis (Priatmoko dkk., 2024).

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah belum berjalan secara merata meskipun pemerintah telah menyediakan regulasi yang menjadi pedoman pelaksanaannya. Perbedaan implementasi terlihat dari kesiapan sumber daya manusia, efektivitas kepemimpinan kepala madrasah, kualitas manajemen kurikulum, hingga ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola perubahan secara sistematis

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edward III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi pelaksana (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Berdasarkan hasil penelitian ini, keempat variabel tersebut belum terpenuhi secara optimal pada seluruh madrasah. Madrasah unggul cenderung memiliki komunikasi kebijakan yang lebih efektif, sumber daya manusia yang lebih siap, komitmen pelaksana yang tinggi, serta struktur organisasi yang mendukung inovasi pembelajaran. Sebaliknya, madrasah reguler masih menghadapi berbagai kendala dalam keempat aspek tersebut sehingga implementasi Kurikulum Merdeka belum mencapai tujuan yang diharapkan (Fullan, 2007).

Salah satu faktor yang paling menentukan keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka adalah kompetensi guru. Guru merupakan pelaksana utama yang menerjemahkan kebijakan menjadi praktik pembelajaran di kelas. Kurikulum Merdeka menuntut guru untuk mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, menyusun modul ajar secara mandiri, melaksanakan asesmen diagnostik dan formatif, serta mengembangkan pembelajaran berbasis proyek yang berpusat pada peserta didik. Oleh karena itu, perubahan kurikulum memerlukan transformasi kompetensi guru secara berkelanjutan (Putri dkk., 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru pada madrasah unggul umumnya lebih siap mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dibandingkan guru pada madrasah reguler. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya partisipasi guru dalam berbagai program

pelatihan, lokakarya, komunitas belajar, dan pendampingan implementasi kurikulum. Sebaliknya, guru pada madrasah reguler masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pengembangan profesional sehingga pemahaman mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen autentik belum sepenuhnya merata. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wiji Hidayati dkk., (2025), yang menyatakan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di MIN 1 Yogyakarta masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan pelatihan guru, padatnya struktur mata pelajaran madrasah, serta keterlibatan orang tua yang belum optimal dalam mendukung pembelajaran berbasis proyek. Meskipun demikian, guru berupaya melakukan adaptasi melalui penyusunan modul ajar mandiri, pemanfaatan media digital, dan asesmen formatif.

Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Wahyudi, Zakia, Anam, dan Analistiani (2024) yang menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesiapan guru, keterbatasan media pembelajaran, minimnya sosialisasi kebijakan, serta kurangnya fasilitas pendukung. Menurut penelitian tersebut, keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka memerlukan peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan melalui pelatihan, pendampingan, dan komunitas belajar profesional sehingga guru mampu mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik (Wahyudi dkk., 2024).

Selain kompetensi guru, kepemimpinan kepala madrasah merupakan faktor strategis yang menentukan keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Kepala madrasah tidak hanya bertugas menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai *instructional leader* yang mampu mengembangkan budaya belajar, membangun kolaborasi antar guru, serta memfasilitasi pengembangan kompetensi pendidik. Kepemimpinan pembelajaran merupakan salah satu determinan utama dalam meningkatkan efektivitas sekolah karena kepala sekolah berperan sebagai agen perubahan yang mengarahkan seluruh warga sekolah menuju pencapaian tujuan pendidikan, Fullan (2007).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala madrasah pada lembaga yang tergolong unggul umumnya memiliki karakteristik kepemimpinan transformasional. Kepala madrasah mampu membangun visi bersama, mendorong inovasi pembelajaran, melaksanakan supervisi akademik secara berkala, serta memberikan ruang bagi guru untuk mengembangkan kreativitas dalam proses pembelajaran. Sebaliknya, pada sebagian madrasah reguler kepala madrasah masih berfokus pada pengelolaan administrasi sehingga proses transformasi pembelajaran berlangsung lebih lambat.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Hardianti, Fatkuroji, dan Hasanah (2021) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kurikulum sangat dipengaruhi oleh kemampuan kepala madrasah dalam menjalankan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Kepala madrasah yang mampu mengintegrasikan seluruh komponen organisasi akan lebih mudah menciptakan lingkungan belajar yang mendukung implementasi Kurikulum Merdeka (Hardianti dkk., 2021).

Aspek lain yang turut memengaruhi implementasi Kurikulum Merdeka adalah ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Pembelajaran berbasis proyek dan

pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan dukungan media pembelajaran, laboratorium, perpustakaan, akses internet, serta perangkat teknologi informasi yang memadai. Hasil sintesis menunjukkan bahwa madrasah unggul umumnya telah memiliki fasilitas pembelajaran yang lebih lengkap sehingga guru lebih mudah menerapkan pembelajaran inovatif. Sebaliknya, madrasah reguler masih menghadapi keterbatasan fasilitas sehingga proses pembelajaran masih didominasi oleh metode konvensional.

Temuan ini mendukung penelitian Pakartiar & Murniarti (2026) yang menyatakan bahwa mutu implementasi kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh kualitas ekosistem pendidikan, meliputi kompetensi guru, kepemimpinan, kesejahteraan tenaga pendidik, fasilitas pembelajaran, serta tata kelola organisasi. Oleh karena itu, reformasi kurikulum harus diikuti dengan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan agar tujuan peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai secara optimal (Pakartiar & Murniarti, 2026).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan implementasi Kurikulum Merdeka merupakan konsekuensi dari perbedaan kapasitas kelembagaan antar madrasah. Madrasah yang memiliki kepemimpinan efektif, guru yang kompeten, budaya organisasi yang kolaboratif, serta dukungan fasilitas yang memadai cenderung mampu mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara lebih optimal. Sebaliknya, madrasah yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya memerlukan dukungan kebijakan afirmatif agar memiliki kesempatan yang sama dalam mewujudkan tujuan Kurikulum Merdeka. Temuan ini memperluas hasil penelitian sebelumnya dengan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka tidak hanya ditentukan oleh kompetensi individu guru, tetapi juga oleh sinergi antara kebijakan pemerintah, kapasitas kelembagaan, dan kepemimpinan pendidikan dalam membangun budaya organisasi yang adaptif terhadap perubahan.

2. Faktor-faktor penyebab kesenjangan implementasi kurikulum merdeka

Hasil sintesis berbagai literatur menunjukkan bahwa kesenjangan implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah merupakan konsekuensi dari interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan. Perbedaan tingkat keberhasilan implementasi tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas kebijakan yang diterbitkan pemerintah, tetapi juga oleh kapasitas internal madrasah dalam mengelola perubahan organisasi. Faktor-faktor yang paling dominan meliputi kompetensi guru, kepemimpinan kepala madrasah, ketersediaan sarana dan prasarana, pembiayaan pendidikan, budaya organisasi, serta dukungan kebijakan pemerintah. Temuan ini memperlihatkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka merupakan proses perubahan sistemik yang membutuhkan kesiapan seluruh komponen pendidikan, bukan sekadar perubahan perangkat administrasi pembelajaran (Fullan, 2007).

a. Kompetensi guru sebagai modal utama implementasi kurikulum

Guru merupakan aktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka karena berhadapan langsung dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kurikulum Merdeka menuntut guru memiliki kemampuan dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi, menyusun modul ajar, menerapkan asesmen diagnostik dan formatif, serta mengembangkan pembelajaran berbasis proyek yang

mampu mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan implementasi kurikulum yang efektif.

Berdasarkan hasil sintesis penelitian, guru pada madrasah unggul memiliki tingkat kesiapan yang lebih tinggi dibandingkan guru di madrasah reguler. Hal tersebut terlihat dari tingginya partisipasi guru dalam berbagai pelatihan implementasi Kurikulum Merdeka, kegiatan komunitas belajar, dan pendampingan profesional. Sebaliknya, guru di madrasah reguler masih mengalami keterbatasan akses terhadap pelatihan sehingga pemahaman mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen autentik belum berkembang secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi Kurikulum Merdeka lebih banyak berfokus pada penyusunan administrasi pembelajaran daripada perubahan praktik pembelajaran di kelas. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Hidayati dkk. (2025) yang menunjukkan bahwa keterbatasan pelatihan guru menjadi salah satu hambatan utama implementasi Kurikulum Merdeka di MIN 1 Yogyakarta. Guru masih memerlukan pendampingan dalam menyusun modul ajar, mengembangkan asesmen formatif, dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek agar tujuan Kurikulum Merdeka dapat tercapai secara optimal.

Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian Wahyudi dkk., (2024) yang menemukan bahwa rendahnya kesiapan guru, keterbatasan media pembelajaran, dan minimnya sosialisasi kebijakan menjadi faktor yang menghambat implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah. Penelitian tersebut menegaskan bahwa peningkatan kompetensi guru harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan komunitas belajar profesional. Dalam perspektif Human Capital Theory, Becker (1993) menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang yang menentukan produktivitas organisasi. Semakin tinggi kompetensi guru yang dimiliki suatu madrasah, semakin besar peluang keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Dengan demikian, peningkatan kualitas guru melalui pengembangan profesional berkelanjutan merupakan investasi strategis bagi peningkatan mutu pendidikan (Arifin, 2023).

b. Kepemimpinan kepala madrasah

Selain kompetensi guru, kepemimpinan kepala madrasah merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Kepala madrasah tidak lagi berperan hanya sebagai administrator, tetapi sebagai *instructional leader* yang bertanggung jawab mengembangkan budaya belajar, meningkatkan kompetensi guru, serta menciptakan iklim organisasi yang mendukung inovasi pembelajaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala madrasah pada lembaga yang tergolong unggul mampu membangun kolaborasi antar guru, melaksanakan supervisi akademik secara berkala, serta memfasilitasi pengembangan profesional guru. Sebaliknya, kepala madrasah pada sebagian madrasah reguler masih lebih banyak menjalankan fungsi administratif sehingga transformasi pembelajaran berlangsung lebih lambat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Hardianti dkk. (2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kurikulum sangat dipengaruhi oleh kemampuan kepala madrasah dalam menjalankan fungsi manajemen pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi, kepemimpinan

pembelajaran memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pembelajaran dan prestasi peserta didik karena kepala sekolah berperan sebagai penggerak perubahan organisasi (Hardianti dkk., 2021).

c. Sarana dan prasarana pembelajaran

Implementasi Kurikulum Merdeka membutuhkan dukungan fasilitas pembelajaran yang memadai, termasuk ruang belajar yang fleksibel, laboratorium, perpustakaan, perangkat teknologi informasi, akses internet, dan media pembelajaran digital. Ketersediaan fasilitas tersebut memungkinkan guru menerapkan pembelajaran berbasis proyek, kolaboratif, dan berdiferensiasi sesuai karakteristik peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa madrasah unggul memiliki fasilitas pembelajaran yang lebih lengkap dibandingkan madrasah reguler. Perbedaan tersebut menyebabkan kualitas implementasi Kurikulum Merdeka menjadi tidak merata. Madrasah yang memiliki fasilitas lengkap mampu mengembangkan pembelajaran inovatif, sedangkan madrasah yang fasilitasnya terbatas masih cenderung menggunakan metode pembelajaran konvensional.

Temuan tersebut mendukung penelitian Pakartiar dan Murniarti (2026) yang menjelaskan bahwa kualitas implementasi kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh kesiapan ekosistem pendidikan, termasuk ketersediaan sarana pembelajaran, kesejahteraan guru, dan tata kelola organisasi. Reformasi kurikulum tidak akan menghasilkan perubahan yang signifikan apabila tidak diikuti dengan pemerataan fasilitas pendidikan (Pakartiar & Murniarti, 2026). Hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan Hapsari, Handoyo, dan Rokhman (2026) yang menyatakan bahwa kesenjangan mutu pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi oleh distribusi guru yang belum merata, keterbatasan infrastruktur pendidikan, serta rendahnya literasi digital. Oleh karena itu, pemerataan fasilitas pendidikan menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pendidikan dasar (Rofi, 2026).

d. Budaya organisasi dan kolaborasi

Budaya organisasi yang mendukung inovasi menjadi karakteristik penting bagi madrasah yang berhasil mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Budaya tersebut tercermin melalui praktik refleksi pembelajaran, kolaborasi antar guru dalam komunitas belajar, supervisi akademik yang berkelanjutan, serta keterlibatan aktif kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Budaya organisasi merupakan seperangkat nilai, keyakinan, dan asumsi dasar yang membentuk perilaku anggota organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Dalam implementasi Kurikulum Merdeka, budaya organisasi yang kolaboratif terbukti mampu memperkuat profesionalisme guru, meningkatkan efektivitas supervisi akademik, serta mempercepat adaptasi terhadap perubahan kebijakan pendidikan (Kurniyanti dkk.2024).

Temuan penelitian ini didukung oleh Nurhadianto, Mauludea, dan Lestari (2025) yang menunjukkan bahwa implementasi P5RA berhasil memperkuat budaya kolaboratif melalui kegiatan proyek, kerja sama dengan masyarakat, dan keterlibatan orang tua dalam pembelajaran. Program tersebut tidak hanya meningkatkan karakter peserta didik, tetapi juga membangun sinergi antara guru, kepala madrasah, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka, (Hidayat & Suyatno, 2022).

3. Implikasi penelitian dan model konseptual kesenjangan implementasi kurikulum merdeka

Hasil sintesis berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah merupakan proses perubahan yang kompleks karena melibatkan berbagai aspek kelembagaan, sumber daya manusia, budaya organisasi, serta kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi tidak cukup hanya diukur dari tersusunnya dokumen kurikulum operasional madrasah atau modul ajar, tetapi harus dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengubah praktik pembelajaran menjadi lebih berpusat pada peserta didik, adaptif terhadap kebutuhan belajar, serta mampu mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik secara utuh. Temuan ini memperlihatkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka merupakan proses transformasi pendidikan yang membutuhkan dukungan sistem pendidikan secara menyeluruh, mulai dari tingkat pemerintah hingga satuan pendidikan (Fullan, 2007).

a. Implikasi teoritis

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980). Teori tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi pelaksana (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Berdasarkan hasil sintesis penelitian, keempat komponen tersebut masih menunjukkan tingkat kesiapan yang berbeda pada setiap madrasah sehingga menghasilkan variasi kualitas implementasi Kurikulum Merdeka. Madrasah yang memiliki komunikasi organisasi yang baik, sumber daya yang memadai, komitmen pelaksana yang tinggi, serta struktur organisasi yang adaptif menunjukkan tingkat keberhasilan implementasi yang lebih tinggi dibandingkan madrasah yang masih menghadapi berbagai keterbatasan (Fullan, 2007).

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah tidak hanya dipengaruhi oleh empat variabel tersebut. Kepemimpinan kepala madrasah, budaya organisasi, serta dukungan pembiayaan pendidikan juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi. Dengan demikian, penelitian ini memperluas perspektif teori implementasi kebijakan dengan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan di madrasah merupakan hasil interaksi antara faktor kebijakan, kapasitas organisasi, dan lingkungan kelembagaan.

Penelitian ini juga mendukung *Human Capital Theory* yang dikembangkan oleh Becker (1993). Menurut teori tersebut, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan investasi yang mampu meningkatkan produktivitas organisasi. Dalam konteks pendidikan, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pendampingan profesional, serta komunitas belajar menjadi investasi strategis dalam meningkatkan kualitas implementasi Kurikulum Merdeka. Madrasah yang memiliki guru dengan kompetensi tinggi cenderung lebih mudah mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, asesmen autentik, dan pembelajaran berbasis proyek dibandingkan madrasah yang guru-gurunya belum memperoleh pengembangan profesional secara memadai (Arifin, 2023).

Selain itu, hasil penelitian ini memperkuat teori perubahan pendidikan (*Educational Change Theory*) yang dikemukakan oleh Fullan (2007), Reformasi pendidikan tidak

cukup dilakukan melalui perubahan regulasi, tetapi harus disertai perubahan budaya organisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kepemimpinan pembelajaran, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dengan demikian, implementasi Kurikulum Merdeka harus dipahami sebagai proses perubahan organisasi yang berlangsung secara berkelanjutan, bukan sekadar pelaksanaan kebijakan administratif.

b. Implikasi praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi kebijakan bagi Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan pengelola madrasah. Pertama, pemerintah perlu memperluas akses pelatihan implementasi Kurikulum Merdeka secara merata kepada seluruh guru madrasah, baik negeri maupun swasta. Pelatihan tidak hanya berorientasi pada penyusunan administrasi pembelajaran, tetapi juga pada peningkatan kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, asesmen autentik, pembelajaran berbasis proyek, dan pemanfaatan teknologi digital. Rekomendasi ini sejalan dengan hasil penelitian Hidayati dkk. (2025) yang menunjukkan bahwa keterbatasan pelatihan menjadi salah satu hambatan utama implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah.

Kedua, penguatan kepemimpinan kepala madrasah perlu menjadi prioritas dalam kebijakan peningkatan mutu pendidikan. Kepala madrasah diharapkan mampu menjalankan peran sebagai *instructional leader* yang membangun budaya organisasi pembelajar, melaksanakan supervisi akademik secara berkelanjutan, serta mendorong kolaborasi antar guru dalam mengembangkan inovasi pembelajaran. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang menegaskan bahwa kepemimpinan pembelajaran memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas sekolah dan peningkatan hasil belajar peserta didik (Rosa & Dania, 2021).

Ketiga, pemerintah perlu menerapkan kebijakan afirmatif dalam pemerataan sarana dan prasarana pembelajaran di madrasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan fasilitas pembelajaran masih menjadi salah satu penyebab utama perbedaan kualitas implementasi Kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, distribusi anggaran pendidikan perlu mempertimbangkan kebutuhan riil masing-masing madrasah agar seluruh satuan pendidikan memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan pembelajaran yang berkualitas. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Hapsari, Handoyo, dan Rokhman (2026) yang menegaskan pentingnya pemerataan fasilitas pendidikan sebagai strategi meningkatkan mutu layanan pendidikan dasar (Rofi, 2026).

c. Model konseptual penelitian

Berdasarkan hasil sintesis berbagai penelitian, penelitian ini mengembangkan model konseptual yang menjelaskan hubungan antara kebijakan pemerintah, kapasitas kelembagaan madrasah, dan kualitas implementasi Kurikulum Merdeka. Model tersebut menunjukkan bahwa kualitas implementasi Kurikulum Merdeka merupakan hasil interaksi antara kebijakan pemerintah dan kapasitas kelembagaan madrasah. Semakin tinggi kapasitas kelembagaan, semakin kecil kesenjangan implementasi yang terjadi.

d. *Novelty* penelitian

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan model konseptual kesenjangan implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah yang mengintegrasikan

teori implementasi kebijakan Edward III, *Human Capital Theory* (Arifin, 2023), dan *Educational Change Theory* (Fullan, 2007). Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada kesiapan guru atau implementasi Kurikulum Merdeka pada satu madrasah tertentu, penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan implementasi merupakan hasil interaksi antara kebijakan pemerintah, kapasitas kelembagaan, kepemimpinan kepala madrasah, budaya organisasi, dukungan pembiayaan, dan ketersediaan sarana pembelajaran.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual berupa kerangka analisis yang dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan peningkatan mutu madrasah yang lebih komprehensif. Selain itu, hasil penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis bagi Kementerian Agama dan pengelola madrasah dalam merancang strategi implementasi Kurikulum Merdeka yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah belum berjalan secara merata karena dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas kelembagaan dalam mengadaptasi kebijakan pemerintah. Keberhasilan implementasi ditentukan oleh sinergi antara kejelasan kebijakan, kompetensi guru, kepemimpinan kepala madrasah, manajemen kurikulum, budaya organisasi, ketersediaan sarana dan prasarana, serta dukungan pembiayaan. Madrasah yang memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat lebih mampu menerapkan pembelajaran yang inovatif, fleksibel, dan berpusat pada peserta didik, sedangkan madrasah dengan keterbatasan sumber daya masih menghadapi berbagai hambatan. Dengan demikian, peningkatan mutu implementasi Kurikulum Merdeka memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan secara menyeluruh dan berkelanjutan, tidak hanya melalui penyempurnaan regulasi, tetapi juga melalui pengembangan organisasi pembelajar di setiap madrasah.

Daftar Pustaka

Apriatni, S., Novaliyosi, N., Nindiasari, H., & Sukirwan, S. (2023). Analisis Kesiapan Madrasah dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka (Studi di MAN 2 Kota Serang). *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *6*(1), 435–446. https://doi.org/10.54371/jiip.v6i1.1399

Arifin, A. S. (2023). Human Capital Investment: Meningkatkan Daya Saing Global Melalui Investasi Pendidikan. *Jurnal Education and Development*, *11*(2), 174–179. https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.4672

Creswell, J. W. (2013). Table of Contents PART I - Preliminary Considerations. *Book*, 270.

Fadhilah, N., & Umami, M. (2023). Kinerja Guru Dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di SDIT Assalam Bandungan Kabupaten Semarang. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, *4*(5), 493–504. https://doi.org/10.35672/afeksi.v4i5.154

Fadly, M., & Syafri, W. (2019). the Implementation of Child-Friendly City Development in Bengkulu City. *International Journal of Kybernology*, *4*(1), 59–70. https://doi.org/10.33701/ijok.v4i1.640

Fullan, M. (2007). The New Meaning of Educational Change , Fourth Edition ! In *Change*.

Hardianti, D., Fatkuroji, F., & Hasanah, S. (2021). Manajemen Kurikulum Kelas Unggulan di MI Darul Ulum Wates Ngaliyan Semarang. *Jawda: Journal of Islamic Education Management*, *1*(1), 35–46. https://doi.org/10.21580/jawda.v1i1.2020.6721

Hidayat, N., & Suyatno, S. (2022). Implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar *Rahmatan lil alamin* di madrasah. *Jurnal Pendidikan Islam*, *11*(2), 155–170. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jpi/article/view/18432

Jauhari, R., Walid, M., & Aziz, A. (2025). Transformasi Kebijakan Kurikulum di Madrasah: Komparasi Kritis antara KMA Nomor 347 Tahun 2022 dan KMA Nomor 450 Tahun 2024. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *8*(7), 7009–7016. https://doi.org/10.54371/jiip.v8i7.8322

Kurniyanti, W. (2024). Penguatan Budaya Mutu Melalui Supervisi Akademik Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *Vol. 9 No*(September), 732–747.

Mutamimah, K., Rahmawati, E. A., & Purwowidodo, A. (2025). Implementation of Merdeka Curriculum by Teachers for Learning Readiness in Madrasah Ibtidaiyah Negeri 11 Blitar. *Al-Madrasah Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, *9*(4), 1839. https://doi.org/10.35931/am.v9i4.5069

Oktapiani, M. (2019). Perencanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Di Indonesia. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan*, *2(1)*, 71–96.

Pakartiar, G. B., & Murniarti, E. (2026). *Kesenjangan Implementasi Kebijakan Mutu Pendidikan dan Kualitas Sdm Indonesia : Telaah Sistemik Atas Kurikulum Merdeka dan Pembelajaran Mendalam*. 568–576.

Priatmoko, S., Santoso, A., Dewi, R. S. I., & Sugiri, W. A. (2024). Examining Teachers' Readiness To Implement the Kurikulum Merdeka in the Madrasah Ibtidaiyah Context. *Al-Bidayah : Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, *16*(1), 67–90. https://doi.org/10.14421/al-bidayah.v16i1.9572

Putri, R. A. R., Ariyanti, N. A., Sugito, & Murti, R. C. (2024). *Elementary School Teachers' Challenges to Implementing Differentiated Instruction in Kurikulum Merdeka*. Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-245-3_44

Rofi, M. (2026). Kesenjangan Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar di Indonesia: Analisis antara Desain Kebijakan dan Praktik Layanan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Madrasah*, *3*(1), 173.

Rohmawan, D. (2023). Peran Guru PAI sebagai Pembimbing dalam Pembinaan Sopan Santun Peserta Didik di Madrasah Aliyah Sunan Ampel Pare Kediri. *Jurnal Jendela Pendidikan*, *6(1)*, 338–345.

Rosa, Dania, E. a. (2021). *Instructional Leadership Practices of Principals at Public Elementary Schools in Indonesia*.

Setyo, R., Ahmadi, N. U. R., Studi, P., Industri, T., Teknik, F., & Surakarta, U. M. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. *1*, 147–173.

Sukiyat, H. (2020). *Strategi Implementasi Pendidikan Karakter*. Jakad Media Publishing.

Wahyudi, I., Zakia, N., Anam, R. K., & Analistiani, A. (2024). Tantangan dan Peluang Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah. *TARQIYATUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Madrasah Ibtidaiyah*, *3*(2), 97–105. https://doi.org/10.36769/tarqiyatuna.v3i2.710

Wiji Hidayati, E. a. (2025). *Implementasi Kurikulum Merdeka Di Min 1 Yogyakarta*. *8*(2), 95–108.